

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN HASIL PENGELOLAAN  
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA PD  
PASAR PALEMBANG JAYA DI KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**Mela Lestari  
07011181621029**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
AGUSTUS 2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN HASIL PENGELOLAAN  
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA PD  
PASAR PALEMBANG JAYA DI KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

**MELA LESTARI**  
**07011181621029**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2020**

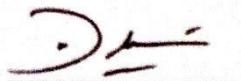
Pembimbing I

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si  
NIP. 197705122003121003



Pembimbing II

Dwi Mirani, S.I.P., M.Si  
NIP. 198106082008122002



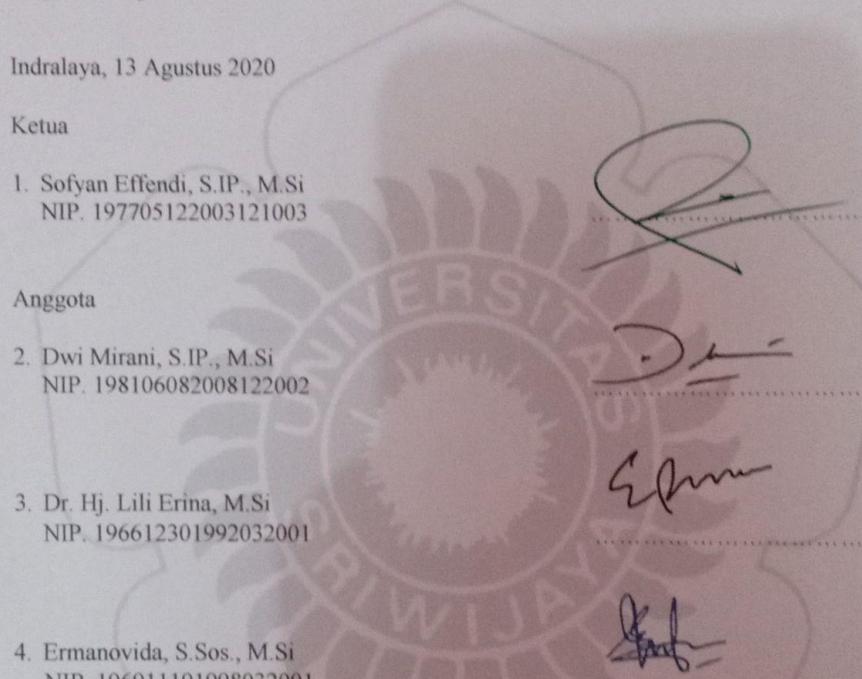
## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Efektivitas Pemungutan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PD Pasar Palembang Jaya di Kota Palembang Tahun 2018" telah dipertahankan dihadapan Tim Pengujian Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 13 Agustus 2020.

Indralaya, 13 Agustus 2020

Ketua

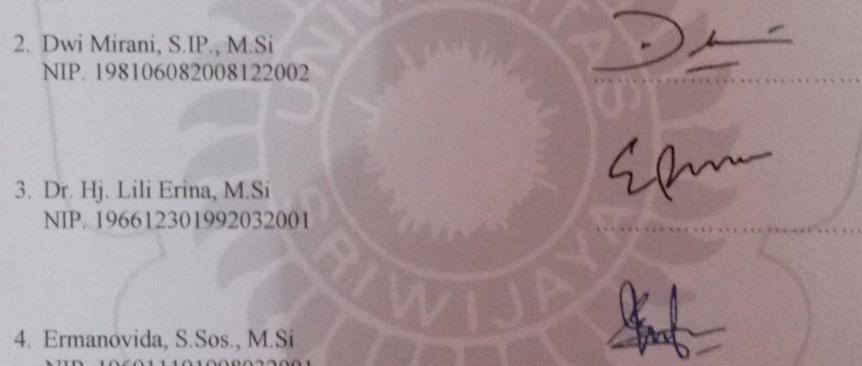
1. Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si  
NIP. 197705122003121003



Handwritten signature of Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si

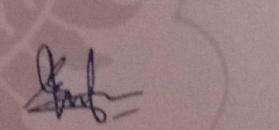
Anggota

2. Dwi Mirani, S.I.P., M.Si  
NIP. 198106082008122002



Handwritten signature of Dwi Mirani, S.I.P., M.Si

3. Dr. Hj. Lili Erina, M.Si  
NIP. 196612301992032001

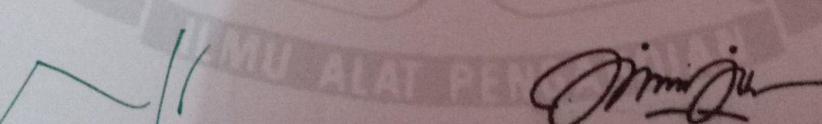


Handwritten signature of Dr. Hj. Lili Erina, M.Si

4. Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001

Mengetahui,  
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Handwritten signature of the Dean of FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Jalani hidup dengan penuh bersyukur”**

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini  
saya persembahkan untuk:**

- ✓ Kedua Orangtuaku, Ayahanda Rosandi dan Ibunda Hartati
- ✓ Keluargaku
- ✓ Tim Riset, Akreditasi dan Laboratorium Administrasi Publik
- ✓ Teman-teman Seperjuanganku
- ✓ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Efektivitas Pemungutan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PD Pasar Palembang Jaya di Kota Palembang Tahun 2018”. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-Nya hingga akhir zaman.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyusunan Skripsi ini mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Rosandi dan Ibu Artati sebagai orang yang tak pernah lelah memberikan doa dan dukungan baik yang bersifat moril maupun materil selama ini.
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik
6. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran dalam membantu pembuatan skripsi ini.
7. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran dalam membantu pembuatan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
10. Bapak Abdul Rizal, S.Pd., MM selaku Kepala PD. Pasar Palembang Jaya
11. Seluruh Pegawai Kantor PD. Pasar Palembang Jaya dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
12. Saudara-saudaraku, serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa.
13. Teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2016 dan semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Juli 2020

Penulis  
Mela Lestari

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Efektivitas Pemungutan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PD Pasar Palembang Jaya di Kota Palembang Tahun 2018". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PD Pasar Palembang Jaya di Kota Palembang Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori *Logic Model*. Menurut *Frecting* yang menggunakan empat dimensi untuk mengukur efektivitas keberhasilan program yaitu *Input*, *Activities*, *Output* dan *Outcomes*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PD Pasar Palembang Jaya di Kota Palembang tahun 2018 kurang efektif karena pada dimensi *Input*, *Output* dan *Outcomes* belum terlaksana dengan efektif. Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah peneliti lain yang menggunakan teori ini disarankan untuk menambahkan satu komponen lagi yaitu *Resistance* sehingga diperoleh faktor hambatan dalam proses pemungutan. Pemberian penyertaan modal kepada BUMD Kota Palembang itu secara bergilir agar seluruh BUMD Kota Palembang secara adil dan merata serta Pembuatan kesepakatan bersama untuk tahun berikutnya berapa besaran target penerimaan yang harus dicapai dari PD. Pasar Palembang Jaya sehingga besaran target tersebut sesuai dengan kemampuan PD. Pasar Palembang Jaya dan akan mengalami peningkatan penerimaan.

### Kata Kunci : Efektivitas, Pemungutan, Pendapatan Asli Daerah

Pembimbing I



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si

NIP. 197705122003121003

Pembimbing II



Dwi Mirani, S.I.P., M.Si

NIP. 198106082008122002

Indralaya, Agustus 2020  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## ***ABSTRACT***

This study entitled "The Effectiveness of Collecting the Result of the Management of Regional Wealth Separated in the City of Palembang in 2018 in the Palembang Regional Market Company". This study aims to determine how the effectiveness of collecting the result of the management of regional wealth separated in the city of Palembang in 2018 in the Palembang Regional Market Company. The research method used in this study is a descriptive qualitative method. The source of data obtained from primary data and secondary data, data collection techniques through observation, interviews and documentation. This study uses Logic Model theory according to Freeling that uses four dimensions to measure the effectiveness of program success, namely inputs, activities, outputs and outcomes. The result of this study indicates that the effectiveness of collecting the result of the management of regional wealth separated in the city of Palembang in 2018 in the Palembang Regional Market Company is less effective because the dimensions of input, output and outcomes have not been implemented effectively. The recommendation recommended in this study is that the Palembang city government should in the next year provide capital participation to the Palembang city owned business entity in rotation so that all Palembang owned business entities receive capital assistance from the Palembang city government in a fair and equitable manner and also the city government of Palembang and Palembang Jaya Market Regional Companies make an agreement for the following year what the target amount of revenue that must be achieved from the Palembang Jaya Market Regional Company so that the target amount is in accordance with the ability of the Palembang Jaya Market Regional Company and will experience an increase in revenue.

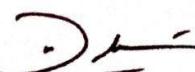
**Keywords : Effectiveness, Collection, Locally Generated Revenue**

Advisor I



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si  
NIP. 197705122003121003

Advisor II



Dwi Mirani, S.I.P., M.Si  
NIP. 198106082008122002

Indralaya, August 2020  
Head of Public Administration Department  
Faculty of Social and Political Sciences  
Sriwijaya University,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Efektivitas .....	8
1. Pengertian Efektivitas.....	8
2. Kriteria dalam Efektivitas.....	8
3. Aspek Efektivitas.....	12
4. Unsur-Unsur Efektivitas .....	13
5. Teori Efektivitas Menurut Hari Lubis dan Martani Huseini .....	14
6. <i>Logic Model</i> Menurut <i>Frecting</i> .....	15
7. Teori yang digunakan .....	15
B. Pendapatan Asli Daerah .....	17
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	17
2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	17
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah .....	20
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan .....	20
D. Kerangka Pemikiran.....	22
E. Penelitian Terdahulu.....	23

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Definisi Konsep .....	27
C. Fokus Penelitian .....	28
D. Jenis dan Sumber Data .....	29
E. Informan Penelitian .....	30
F. Teknik Pengumpulan Data .....	30
G. Teknik Analisis Data .....	31
H. Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
1. Sejarah Singkat‘Kantor PD. Pasar Palembang Jaya .....	35
2. Visi dan Misi PD. Pasar Palembang Jaya.....	37
3. Tugas Pokok dan Fungsi PD. Pasar Palembang Jaya.....	37
4. Struktur Organisasi PD. Pasar Palembang Jaya .....	38
B. Efektivitas Pemungutan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kota Palembang Tahun 2018 pada PD. Pasar Palembang Jaya .....	46
1. <i>Input</i> .....	48
2. <i>Activities</i> .....	54
3. <i>Output</i> .....	59
4. <i>Outcomes</i> .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kota Palembang Tahun 2014-2018 .....	4
Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PD Pasar Palembang Jaya Tahun 2014-2018 .....	5
Tabel 3 Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 4 Fokus Penelitian.....	28
Tabel 5 Klasifikasi Pegawai pada PD Pasar Palembang Jaya per Bidang Tahun 2020 .....	49
Tabel 6 Laporan Keuangan PD Pasar Palembang Jaya Tahun 2018.....	60
Tabel 7 Hasil Analisis Efektivitas Pemungutan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kota Palembang Tahun 2018 pada PD Pasar Palembang Jaya .....	65

## **DAFTAR GAMBAR**

Halaman

Gambar 1.	Bagan Kerangka Pemikiran .....	22
Gambar 2.	Kantor PD. Pasar Palembang Jaya .....	35
Gambar 3	Struktur Organisasi PD. Pasar Palembang Jaya .....	46
Gambar 4	Nota Dinas .....	56
Gambar 5	Bukti Telah Melakukan Penyetoran .....	57
Gambar 6	Bukti Setoran .....	57
Gambar 7	Keadaan Pasar yang Sepi Pembeli.....	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
2. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Balasan Penelitian
5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I
6. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II
7. Kartu Perbaikan Seminar Proposal
8. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
9. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
10. Kartu Perbaikan Ujian Komprehensif Skripsi
11. Pedoman Wawancara
12. Data Pegawai PD Pasar Palembang Jaya
13. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan PD.  
Pasar Palembang Jaya

## **DAFTAR SINGKATAN**

- |          |  |
|----------|--|
| 1. PAD   | : Pendapatan Asli Daerah                     |
| 2. APBD  | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah     |
| 3. PT    | : Perseroan Terbatas                         |
| 4. PDAM  | : Perusahaan Daerah Air Minum                |
| 5. PD    | : Perusahaan Daerah                          |
| 6. BUMD  | : Badan Usaha Milik Daerah                   |
| 7. BUMN  | : Badan Usaha Milik Negara                   |
| 8. BPKAD | : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan beragam suku dan budaya. Daerah di Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis setiap daerah yang berbeda menyebabkan perbedaan dalam hal pertumbuhan ekonomi dan pendapatan setiap daerah di Indonesia. Hal ini menyebabkan setiap daerah harus berusaha untuk terus mengembangkan segala aspek yang dimiliki oleh daerahnya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi daerahnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan bentuk pendapatan daerah yang didapatkan dengan cara mengembangkan potensi masing-masing daerah untuk melakukan proses pembangunan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintahan daerah yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui peningkatan pelayanan serta pemberdayaan dan pengikutsertaan peran serta masyarakat dalam pemerintahan. Upaya ini dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diberlakukannya otonomi daerah membuat setiap daerah berhak mengurus daerahnya masing-masing dan berkreasi dalam meningkatkan pendapatan daerahnya sebagai sumber penerimaan daerah dalam rangka melaksanakan proses pembangunan. Setiap daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk menciptakan kesejahteraan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pemungutan terhadap masyarakat. Selama ini pemungutan daerah di atur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah lalu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sub sistem dari sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu, pendapatan dalam setiap tahun anggaran menjadi hal yang perlu diperhatikan. Besarnya pendapatan berpengaruh terhadap besarnya belanja daerah oleh pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah memegang peran penting sebagai tulang

punggung pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, kemampuan dan kemandirian daerah untuk melaksanakan otonomi daerah diukur berdasarkan besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD suatu daerah. Pendapatan asli daerah dalam konsep ideal juga merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan atau mewujudkan otonominya. Berdasarkan hal ini, pendapatan asli daerah memiliki peran yang sangat vital bagi suatu daerah sehingga daerah terus berupaya meningkatkan penerimaan daerahnya.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2014:101). Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi derah;
3. Hasil Pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu perwujudan dari otonomi daerah yaitu Kota Palembang yang diberi keleluasaan oleh pemerintah pusat dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai perwujudan dari asas desentralisasi. Salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan melakukan pemungutan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kota Palembang terus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD. Berdasarkan data yang bersumber pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, PAD memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Daerah setelah Dana Perimbangan. Salah satu bagian dari pendapatan asli daerah kota Palembang yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan yang diperoleh melalui 4 perusahaan milik daerah yang terdapat di Kota Palembang yang meliputi :

1. Bank Sumsel Babel.
2. PDAM Tirta Musi
3. PD Pasar Palembang Jaya
4. PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya

Berdasarkan data penerimaan daerah Kota Palembang pada tahun 2014-2018, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan sumbangsih yang cukup besar pada pendapatan asli daerah kota Palembang namun merupakan penerimaan terkecil bila dibandingkan dengan jenis penerimaan lainnya seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Berikut data mengenai target anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2014-2018 yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kota Palembang Tahun 2014-2018

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2014	56.000.000.000,00	28.021.442.345,64	50,04%
2015	36.279.541.543,18	34.503.218.051,18	95,10%
2016	52.950.000.000,00	50.362.039.101,20	95,11%
2017	64.452.894.174,00	61.860.027.525,97	95,98%
2018	79.943.112.945,11	62.318.561.125,83	77,95%

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, 2014-2018*

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi yang menghasilkan persentase penerimaan pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami naik turun. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan dan persentase penerimaan hanyalah 77,95% yang lebih rendah dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Berdasarkan data penerimaan daerah yang diperoleh dari Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, penyebab penerimaan yang menyusut ini dikarenakan penerimaan dari PD Pasar Palembang Jaya yang realisasi penerimanya pada tahun 2018 hanya tercapai 2% dari target yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah data mengenai penerimaan daerah yang berasal dari PD Pasar Palembang Jaya selama tahun 2014-2018 :

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PD Pasar Palembang Jaya Tahun 2014-2018

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2014	15.000.000.000,00	592.570.015,00	3,95%
2015	2.000.000.000,00	223.876.508,00	11,18%
2016	2.500.000.000,00	277.088.115,00	11,08%
2017	2.500.000.000,00	365.215.667,00	14,61%
2018	2.500.000.000,00	59.279.211,00	2,07%

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, 2014-2018*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui jika pada PD Pasar Palembang Jaya mulai dari tahun 2014-2018 tidak pernah mencapai target penerimaan dan selalu terbilang kecil meskipun target yang ditetapkan sudah dikurangi dari tahun 2015 dan realisasi penerimaan pun mengalami naik turun yang signifikan. Berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PD Pasar Palembang Jaya hal ini disebabkan karena PD Pasar Palembang Jaya selama beberapa tahun belakangan tidak mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah Kota Palembang sehingga hanya memberikan dana yang terbatas kepada Pemerintah Kota Palembang. Oleh karena itu potensi sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PD Pasar Palembang Jaya layak mendapatkan perhatian dari instansi yang menangani dan agar pendapatannya bisa lebih optimal diperlukan dukungan serta kesadaran dari lembaga pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat turut serta membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Penurunan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terjadi pada tahun 2018, target penerimaan yang tidak pernah tercapai selama rentang

waktu 2014-2018, serta berbagai masalah yang terjadi pada BUMD di Kota Palembang khususnya PD Pasar Palembang Jaya seperti tidak adanya penyertaan modal dari Pemerintah Kota Palembang untuk PD Pasar Palembang Jaya menyebakan hal ini menarik untuk diteliti mengenai **“Efektivitas Pemungutan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PD Pasar Palembang Jaya di Kota Palembang Tahun 2018”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalahnya yaitu Bagaimana efektivitas pemungutan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PD Pasar Palembang Jaya di Kota Palembang Tahun 2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemungutan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PD Pasar Palembang Jaya di Kota Palembang Tahun 2018.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna untuk melengkapi dan mengembangkan Ilmu Administrasi Publik dan dijadikan sebagai masukan dan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga sebagai sub mata kajian dalam konteks Ilmu Administrasi Publik.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan dan

peningkatan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kota Palembang khususnya pada PD Pasar Palembang Jaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Cahyono, Bambang Tri. 1983. *Pengembang Kesempatan Kerja*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Lubis, S.M. Hari & Huseini, Martani. (1987). *Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta : Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.
- Muasaroh, Latifatul. 2010. *Aspek-Aspek Efektivitas*. Yogyakarta : Literatur Buku.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Terjemahan oleh Dra. Magdalena Jamin. Jakarta : LPPM.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sutrisno. 2007. *Manajemen Keuangan : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Umar, Husein. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pusaka.

### **Peraturan-Perundangan**

- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tentang *Interpretasi Kriteria Efektivitas*.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang *Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang *Pendirian Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Palembang Jaya*.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang *Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya*.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2014 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya*
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah*.

### **Jurnal dan Skripsi**

Dedi Suharyadi, dkk. 2018. Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap PAD Kota Bogor. *Universitas BSI Bandung*, (Online), Vol. 5, No. 2, (<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>, diakses 10 November 2019).

Salsabila, Ellis. 2013. Logic Model pada Evaluasi Program. *Universitas Negeri Jakarta*, (Online), Vol. 12, No. 1, (<https://id.scribd.com/doc/314329730/34-104-1-PB>, diakses 5 Maret 2020).

Masruri. 2014. Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Sudi Kasus pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Tahun 2010. *Governance and Public Policy*, 11.

Sari, Lita Novita. 2016. *Analisis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*. Palembang :Politeknik Negeri Sriwijaya.

Usman Funangi, dkk. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua. *Universitas Cenderawasih*, (Online), Vol. 3 No. 2, (<https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/view/707>, diakses 10 November 2020)

### **Internet**

Transformasi. 2016. Masih Layakkah PD Pasar Palembang Jaya dipertahankan. (Online). <http://www.transformasinews.com/masih-layakkah-pd-pasar-palembang-jaya-dipertahankan/>. Diakses 20 Januari 2020.

<https://www.banksumselbabel.com>. Diakses 20 Januari 2020.

[www.tirtamus.com](http://www.tirtamus.com). Diakses 20 Januari 2020.

<https://sp2j.co.id>. Diakses 20 Januari 2020.

### **Lain-lainnya**

Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018.

Dokumen Perusahaan PD Pasar Palembang Jaya

Laporan Keuangan PD Pasar Palembang Jaya Tahun 2018